

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2013**



**DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2014**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa dan atas berkat serta karuniaNya kami dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor: 21 Tahun 2008 tentang kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 060/03/Bag.Organisasi tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 Lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Malinau.

Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari sempurna baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi tercapainya pelayanan yang lebih baik dan kesempurnaan laporannya dimasa mendatang.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, khususnya kepada Staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau.

Akhirnya harapan kami semoga laporan ini, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau Tahun 2008 dapat menjadi revisi dan gambaran lebih lanjut tentang Kinerja Tahun-tahun berikutnya.

Malinau, 20 Januari 2014

KEPALA DISSOSNAKERTRANS,

Drs. Yusuf Rapa, M.Si
Nip. 19581213 198501 1 009

DAFTAR ISI

A. Ringkasan Eksekutif.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Organisasi	1
D. Struktur Organisasi	6
E. Keadaan Umum Wilayah	7
F. Aspek Keuangan	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PENGAJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	12
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2013	20
C. Penetapan Kinerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013	30
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
C. Akuntabilitas Keuangan.....	36
BAB IV PENUTUP	
A. Lampiran-lampiran	;;
1. Penetapan Kinerja Tahun 2014	;;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014	;;

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategi (RENSTRA) yang telah disusun oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau dengan VISI yang telah ditetapkan adalah:

” TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEMPATAN KERJA DAN PELUANG BERUSAHA YANG KONDUSIF DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI”

Setelah dilakukan beberapa analisis maka dicapai faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK) untuk mewujudkan Visi dimaksud antara lain :

1. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau akan mendukung peluang usaha dan meningkatkan kesempatan kerja.
2. Koordinasi yang baik antar instansi akan mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999.
3. Koordinasi yang baik antar instansi akan mempermudah perijinan sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Malinau dan sekaligus akan membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta akan memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah.
4. Keterbatasan dana di daerah akan menjadi hambatan untuk mencari investor yang bonafide dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya Partisipasi Pemberdayaan Sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKM) untuk ikut serta melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial
2. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan terciptanya kebersamaan dan kesetiakawanan sosial
3. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif.
4. Terwujudnya kualitas SDM ketenagakerjaan dan terciptanya hubungan kerja yang harmonis antar pekerja, pengusaha dan pemerintah.
5. Terbentuknya usaha yang layak berkembang dalam suasana kebersamaan

Untuk mencapai sasaran dimaksud upaya yang telah dilakukan adalah menetapkan 14 (empat belas) program yang dijabarkan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan 26 (dua puluh enam) kegiatan .

Malinau, 20 Januari 2014

KEPALA DISSOSNAKERTRANS,

Drs. Yusuf Rapa,M.Si
Nip. 19581213 198501 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi.

B. Maksud dan Tujuan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau
- b. Memperoleh informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau.
- c. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

2. Tujuan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program / kegiatan, meliputi kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka waktu satu tahun.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

3. Kabid Sosial

- a. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial
- b. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
- c. Seksi Keagamaan

4. Kabid Pengendalian dan Penempatan Perluasan Lapangan Kerja Hubungan Industrial dan syarat kerja.

- a. Seksi Inventarisasi Tenaga Kerja
- b. Seksi Bidang Penyuluhan Bidang Kerja
- c. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja

5. Kabid Kesejahteraan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan

- a. Seksi Norma Kerja dan Kesejahteraan

- b. Seksi Bina Pekerja, Kesehatan dan Lingkungan
- c. Seksi Penelitian Pengawasan Jamsostek & Keslamatan Kerja.

6. Kabid Transmigrasi

- a. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- b. Seksi Penempatan Transmigrasi
- c. Seksi Pembinaan Transmigrasi.

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 21 Tahun 2008 Tugas Pokok dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupten Malinau adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian

b. Fungsi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- 2) Pelaksanaan tugas bidang Sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian
- 3) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang Sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
- 4) Pembinaan Sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian,
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Sekretariat, dan Bidang

a. Sekretariat Dinas

Tugas : Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Fungsi : Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan urusan umum;
- 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- 5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
- 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi
- 7) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

b. Bidang Sosial

Tugas : Menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna sosial dan bantuan sosial.

Fungsi : Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Sosial;
- 2) Perumusan kebijakan teknis Bidang sosial, rehabilitasi tuna sosial dan bantuan sosial;
- 3) Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian kesejahteraan Bagian sosial;
- 4) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian rehabilitasi tuna sosial;
- 5) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian Bidang sosial;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang sosial.

c. Bidang Tenaga Kerja

Tugas : Menyelenggarakan, membina dan mengendalikan pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, kesejahteraan pekerja serta pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan ;
- 3) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
- 4) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
- 5) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan;
- 6) Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian ketransmigrasian; dan
- 7) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

d. Bidang Transmigrasi

Tugas : Menyelenggarakan penyuluhan bidang Transmigrasi mengadakan pendataan, membimbing dan pelatihan kepada calon Transmigran, pengangkutan Transmigran dari tempat asal sampai kelokasi Transmigrasi

Fungsi :

- a. Menyusun rencana Bidang Transmigrasi sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. Melaksanakan penyuluhan bidang Transmigrasi;
- c. Melaksanakan pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon Transmigran;
- d. Melaksanakan pengangkutan Transmigran dari tempat asal sampai ke lokasi Transmigrasi;

4. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurut golongan dapat dilihat pada table dibawa ini :

Tabel 1.

Jumlah pegawai menurut golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Keterangan
----	----------------------	--------	------------

1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang	
2	Pembina Tk. I IV/b	2 Orang	
3	Penata Tk I (III/d)	5 Orang	
4	Penata (III/c)	4 Orang	
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	8 Orang	
6	Penata Muda (III/a)	2 Orang	
7	Pengatur (II/c)	1 Orang	
8	Pengatur Muda Tk I (II/b)	11 Orang	
9	Pengatur Muda (II/a)	3 Orang	
	JUMLAH	37 Orang	

b. Jumlah pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurut pendidikan dapat dilihat pada table dibawa ini :

Tabel 2.

Jumlah pegawai menurut pendidikan sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	3 Orang	
2	S1	17 Orang	
3	SLTA	17 Orang	
	JUMLAH	37 Orang	

c. Jumlah pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabatan/ Eselon dapat dilihat pada table dibawa ini :

Tabel 3.

Jumlah pegawai menurut Jabatan Struktural / Eselon sebagai berikut :

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II/b	1 Orang	
2	Eselon III/a	1 Orang	
3	Eselon III/b	4 Orang	
4	Eselon IV/a	11 Orang	
	JUMLAH	27 orang	

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dapat dilihat pada lampiran

E. KEADAAN UMUM WILAYAH

Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten strategis dibagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Kabupaten berada di Malinau. Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, dimana secara astronomis terletak pada posisi 1°21'36" - 4°10'55"LU dan 114°35'22" - 116°50'55"BT.

Kondisi alam Kabupaten Malinau didominasi oleh wilayah daratan yang luasnya mencapai sekitar 39.766,33 km², yang merupakan daratan, dengan topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Secara Administratif Kabupaten Malinau memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan
- ❖ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
- ❖ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kutai Timur, Berau dan Kabupaten Tana Tidung
- ❖ Sebelah Barat : berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak)

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sampai dengan akhir bulan Desember 2013 jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 82.880 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

- Kecamatan Mentarang : 5.568 jiwa
- Kecamatan Malinau Kota : 27.423 jiwa
- Kecamatan Pujungan : 2.107 jiwa
- Kecamatan Kayan Hilir : 1.585 jiwa
- Kecamatan Kayan Hulu : 3.509 jiwa
- Kecamatan Malinau Selatan : 4.008 jiwa
- Kecamatan Malinau Utara : 13.403 jiwa
- Kecamatan Malinau Barat : 11.191 jiwa
- Kecamatan Sungai Boh : 2.507 jiwa
- Kecamatan Kayan Selatan : 2.275 jiwa
- Kecamatan Bahau Hulu : 1.607 jiwa
- Kecamatan Mentarang Hulu : 1.348 jiwa
- Kecamatan Malinau Selatan Hulu : 2.473 jiwa
- Kecamatan Malinau Selatan Hilir : 3.041 jiwa
- Kecamatan Sungai Tubu : 835 jiwa

F. ASPEK KEUANGAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau didukung oleh dana APBD yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Pelaksanaan Perubahan (DPPA-SKPD) Anggaran 2013 dengan target dan realisasi sebagai berikut

Target dan Realisasi Dana APBD melalui DPA-SKPD Tahun Anggaran 2013

Tabel. 4

Anggaran Belanja Tidak Langsung

No	Uraian (Jenis Belanja)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	<u>2.222.168.750</u>	<u>2.087.269.007</u>
	A. Belanja Pegawai	2.222.168.750	2.087.269.007
2	Belanja Langsung	<u>7.303.650.000</u>	<u>6.957.836.300</u>
	a. Belanja Pegawai	494.195.000	471.400.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.775.455.500	6.452.436.300
	c. Belanja Modal	34.000.000	34.000.000
	Jumlah	9.525.819.250	9.045.105.307

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2013 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.222.168.750,- dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.303.650.000,- Rincian Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau pada tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 5

Anggaran Belanja Langsung

No	Uraian (Nama Program)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penunjang Administrasi Perkantoran	400.000.000	399.588.000
B	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
1	Pelatihan keterampilan kepada Anak Putus Sekolah	693.141.000	692.575.000
C	Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial		
1	Pemberdaya Lanjut Usia	100.000.000	98.475.000
2	Pemberdayaan TKSK & TKSM	150.000.000	149.494.000
3	Rehabilitas Rumah tidak Layak Huni	1.800.000.000	1742.699.500
4	Penanganan,Pencegahan dan penanggulangan Norkoba,Miras dan Zat Adiktif Lainnya	686.795.500	677.934.200

D	Program pembinaan Para penyandang cacat dan Trauma		
	Pengikatan Kemampuan	250.000.000	235.667.000
1	Pendamping Sosial,Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS		
E	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo		
1	Dana Pendamping Peningkatan Kesejahteraan Panti Asuhan	244.466.000	238.871.000
F	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
1	Konsultasi Partisipasi Gereja Dalam Pelayanan Hak Azasi Manusi	75.000.000	71.602.000
2	Pembinaan Guru Sekolah Minggu dan TK Al-Quran	75.000.000	69.960.000
3	Pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial	100.000.000	99.535.000
4	Pelatihan keterampilan Tata Boga,Tata Rias dan Otomotif	221.173.000	212.862.400
G	Program Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan		
1	Pelatihan Keterampilan Menjahit Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja	102.906.000 364.969.000	102.906.000 361.243.000
H	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga TK		
1	Pengawasan,Peningkatan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keseharan Kerja	100.000.000	100.000.000
I	Program Peningkatan Kualitas		
1	Pemberdayaan Dewan Pengupahan	115.200.000	114.745.000
J	Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang		

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
1	Pembinaan dan Pengawasan serta Seleksi Kelompok Usaha Bersama(KUBE) Penumbuhan dan Pengembangan	75.000.000	74.996.000
2	Peningkatan dan Pelatihan PSM,Karang Taruna dan Orsos	75.000.000	72.240.000
	Pemberdayaan TKSK dan TKSM	75.000.000	61.775.000
3	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial	150.000.000	137.599.000
K	Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil		
1	Dana Pendamping KAT	900.000.000	853.145.200
L	Program Penyelesaian Hubungan Industri		
1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	100.000.000	99.726.100
M	Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
1	Sosialisasi Jamsostek Bagi Pedagang Kecil Informal (Pedagang Kaki Lima)	100.000.000	99.231.000
N	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		
1	Survey Kawasan dan Pendapatan Tranmigrasi Lokal Kab. Malinau	100.000.000	98.365.500
2	Perencanaan Transmigrasi Lokal di Long Tebuan Kec. Sungai Boh	150.000.000	0
O	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Bursa Kerja Online		
1	pengembangan Sarana dan Prasarana Bursa Kerja Online	100.000.000	92.592.000

	Jumlah	7.303.650.000	6.957.836.300
--	---------------	----------------------	----------------------

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Stratejik Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penyusunan Rencana Stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik. Melalui pendekatan Perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

1. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi.

Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi dan disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

1. Visi :

**Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
Yang Kondusif dan Pembinaan Pengembangan**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dalam ruang lingkup Kabupaten Malinau

Penjabaran makna dari Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Sosial: masih banyaknya masyarakat yang perlu mendapat penanganan yang serius terutama penyandang masalah sosial seperti: Fakir miskin, anak terlantar, tuna susila, Lanjut Usia, cacat dan lain-lain.
- Angkatan Kerja yang mandiri dan Produktif: angkatan kerja yang mempunyai jiwa mandiri berwirausaha yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempunyai kualitas yang hebat serta kemampuan daya saing tinggi.
- Pengembangan Pemukiman Transmigrasi dan Persebaran Penduduk: pengembangan pemukiman Transmigrasi adalah solusi alternatif untuk membuka lapangan kerja dan menekan laju pengangguran sehingga Persebaran dan laju perekonomian tidak hanya terpusat di kota.
- Usaha bersama Pemerintah dan Masyarakat: laju pembangunan secara menyeluruh tidak akan pernah berhasil tanpa ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
- Pembangunan Kabupaten Malinau yang aman, nyaman, damai dan sejahtera: sesuai Visi kabupaten Malinau dengan model pembangunan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) diharapkan rasa aman (tanpa Ketakutan, tekanan dari masyarakat lain), rasa nyaman (sehat, sejuk, bersih dan menyenangkan), rasa damai (hidup berdampingan, saling menghormati, menghargai serta toleran terhadap warga lainnya yang berbeda baik suku maupun keyakinan) dan sejahtera (kesejahteraan terhadap penyandang masalah sosial, Tenaga kerja, dan penduduk transmigrasi)

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka rumusan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka pencapaian Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dalam 5 (lima) Misi yaitu :

2. Misi :

1. Meningkatkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial, Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan religius.
3. Mewujudkan pengembangan perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
4. Memantapkan kesepakatan bagi pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan melalui pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.
5. Mewujudkan pengembangan transmigrasi sebagai bagian dari pemerataan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam perencanaan strategis untuk mewujudkan Visi Misi di maksud mempunyai tujuan dan sasaran yang cukup jelas antara lain :

- Tujuan :**
1. Meningkatkan kemampuan SDM dan Proses Pelayanan.
 2. Terwujudnya Pelayanan yang optimal dan berkualitas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 3. Meningkatkan Kesejahteraan PMKS.
 4. Terwujudnya Pengembangan kemampuan TKSM, Lembaga Ketenagakerjaan, Organisasi-organisasi pekerja dan penguasa serta lembaga-lembaga lainnya.
 5. Meningkatkan kualitas Tenaga kerja dan berkembangnya peluang lapangan kerja dan Kesempatan berusaha.
 6. Meningkatkan pemahaman pekerja dan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang – undangan dan Ketenagakerjaan.
 7. Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang mampu menyerap dan menumbuh kembangkan ekonomi secara merata.

- Sasaran :**
1. Tersedianya SDM yang mempunyai Skill komputerisasi dan Manajemen Pelayanan yang Handal.
 2. Tersedianya SDM yang berkualitas dan kreatif untuk mengembangkan pelayanan yang optimal dan bermutu.
 3. Tersedianya Sarana dan prasarana penunjang baik kualitas maupun kualitas untuk mengurangi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 4. Tersedianya TKSM/TKSK, Lembaga ketenagakerjaan, Organisasi pekerja dan pengusaha lainnya yang mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan masyarakat di Kab. malinau.
 5. Tersedianya Tenaga kerja yang handal dan berdaya saing tinggi.
 6. Tersedianya Peraturan perundang –undangan yang jelas tentang semua aspek bidang ketenagakerjaan baik dari Pusat maupun berdaya saing tinggi.
 7. Tersedianya Daerah Transmigrasi Khususnya Transmigrasi khususnya Transmigrasi lokal untuk Pemerataan laju pembangunan.

4. Strategi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi, Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka perlu adanya strategi yang diambil, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius.

Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas diperlukan tenaga-tenaga SDM yang professional memiliki kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung tujuan pembangunan serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah belum optimalnya mutu pelayanan, kurangnya partisipasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terbatasnya sarana dan pra sarana.

Pelayanan berkualitas dapat dilakukan dengan cara terbukanya akses-akses pelayanan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan yang terbaik.

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para PMKS, Tenaga Kerja/Pekerja/Buruh dan Transmigran.

Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pekerja dan Transmigran dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan berinteraksi sosial dan keberfungsian sosial secara lebih optimal sehingga mereka mampu mengatasi berbagai persoalan sosial.

4. Meningkatkan kemampuan dan potensi TKSM/TKSK, Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan, Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Lembaga-lembaga lainnya.

Sebagai Dinas yang merupakan pelayanan dengan Sumber Daya Manusia, maka diperlukan lingkungan yang mendukung proses pelayanan, untuk mewujudkannya maka lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang bergerak di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan.

5. Mengembangkan kualitas TKSK, Tenaga Kerja dan Transmigran dalam perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing di pasar kerja. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau terus berusaha agar TKSM/TKSK, Tenaga Kerja, dan Transmigran harus mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan permintaan pasar kerja sehingga mereka mampu mengaplikasikan keterampilannya baik di dunia kerja maupun dunia usaha.

6. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga, Dinas/Instansi baik Daerah, Provinsi maupun Pusat.

Dengan dijalinnya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di Tingkat Daerah, Provinsi maupun Pusat baik Swasta maupun Pemerintah akan membuka peluang dan memperluas jaringan pelayanan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

7. Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang mampu menyerap dan menumbuhkembangkan ekonomi secara merata.

Dengan adanya wilayah Transmigrasi khususnya Transmigrasi Lokal, maka akan menumbuhkan pemerataan laju pembangunan secara bertahap sehingga laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota.

5. Kebijakan

Strategi yang telah dirumuskan tersebut, diterjemahkan lebih lanjut ke dalam rumusan-rumusan kebijakan.

Rumusan kebijakan ini disusun secara konsisten dan spesifik untuk menjamin agar Penyusunan Rencana Kerja menjadi sistematis dalam tatanan kerangka logis dan akuntabilitas. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius. Untuk melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi.
 - b. Membina dan mendorong Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan kemampuannya baik kemampuan intelegensi, emosional maupun spiritual.
2. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Strategi tersebut dirumuskan ke dalam kebijakan sebagai berikut :

Optimalisasi pelayanan-pelayanan yang sudah tersedia. Memperluas jangkauan dan jaringan pelayanan yang berkualitas dalam rangka penanganan masalah sosial, pengangguran dan Transmigran. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan sarana yang memadai dan berkualitas.

1. Meningkatkan kemampuan dan potensi TKSK, Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan, Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Lembaga-lembaga lainnya

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut:

Meningkatkan kinerja Lembaga-lembaga Sosial, Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan dan Organisasi Pekerja/Pengusaha sehingga mampu memberikan pelayanan dan pemecahan masalah sosial dan masalah ketenagakerjaan. Fasilitasi dan pemberian kemudahan untuk pengembangan jaringan Lembaga-lembaga Sosial dan Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pelayanan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4. Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pekerja/Buruh dan Transmigran.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut:

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pengangguran dan Transmigran. Peningkatan penanganan permasalahan sosial dan ketenagakerjaan (pengangguran) berbasis masyarakat. Pemberian stimulant/modal usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penganggur dan Transmigran.

5. Mengembangkan kualitas Tenaga Kerja dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut:

Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan bagi penganggur dan penyandang masalah sosial. Meningkatkan kualitas pelatihan sehingga

menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang mampu bersaing di pasar kerja. Meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelatihan yang berkualitas.

6. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga/ Dinas/ Instansi Daerah, Provinsi dan Pusat.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

Peningkatan koordinasi dengan Lembaga/Dinas/Instansi yang berwenang dalam Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran. Peningkatan jalinan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial dan ketenagakerjaan. Pengembangan Sistem Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas.

6. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator dari masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.6
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
1	Tersedianya SDM yang mempunyai Skill komputerisasi dan manajemen pelayanan yang handal.	a	Jumlah tenaga yang menguasai IPTEK
2	Tersedianya SDM yang berkualitas dan kreatif untuk mengembangkan pelayanan yang optimal dan bermutu.	a	Jumlah tenaga yang siap kerja dalam pelayanan optimal dan berkualitas
3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang baik kualitas maupun kuantitas untuk	a	Jumlah PMKS yang mendapat sarana dan prasarana
4	Tersedianya TKSM/TKSK, lembaga ketenagakerjaan, organisasi pekerja dan pengusaha lainnya yang mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan masyarakat di kabupaten Malinau.	a	Jumlah tenaga TKSM/TKSK yang mampu dan berpotensi di setiap kecamatan
		b	Jumlah pasilitas perselisihan hubungan kerja antar karyawan dan

			perusahaan
5	Tersedianya Tenaga Kerja yang handal dan berdayasaing tinggi.	a	Jumlah Tenaga Kerja yang siap bekerja
6	Tersedianya peraturan Perundang-undangan yang jelas tentang semua aspek bidang Ketenagakerjaan baik dari Pusat maupun Daerah.	a	Jumlah Peraturan perundang – undangan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
7	Tersedianya Daerah Transmigrasi khususnya Transmigrasi Lokal untuk pemerataan laju pembangunan.	a	Jumlah kawasan transmigrasi yang mampu menyerap dan dan menumbuhkembangkan ekonomi secara merata

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

I. Urusan Wajib Pelayanan Administrasi Perkantoran

A. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penunjang
Administrasi Perkantoran

B. Pencapaian
Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. a. Terlaksananya pelayanan Pegawai Disosnakertrans

b. Tercapainya pelayanan Pegawai Disosnakertrans sebanyak 37 Orang
Pegawai

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 7

Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Administrasi Perkantoran

	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penunjang Administrasi Perkantoran	400.000.000	399.588.000
	Jumlah	400.000.000	399.588.000

D. Permasalahan dan Solusi

I. Permasalahan

- a. Keterlambatan penyusunan laporan bulanan dari masing-masing seksi baik fisik maupun laporan keuangan.
- b. Pengelolaan arsip surat, naskah dinas dan pengelolaan barang belum optimal dikarenakan keterbatasannya pengelola dan sarana prasarana terutama almari dan rak penyimpanan arsip aktif dan in aktif yang belum mencukupi.
- c. Diperlukannya regenerasi computer untuk menunjang tugas.

II. Solusi

- 1. Perlu adanya bimtek komitmen dari staf yang diberi tugas menyusun pelaporan pada masing-masing seksi.
- 2. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengajukan penambahan sarana dan prasarana kearsipan.
- 3. Mengusulkan penggantian computer.

II. Urusan Wajib

Bidang Sosial

A. Program dan Kegiatan

- 1. **Program**
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
 - a. Pelatihan keterampilan kepada Anak Putus Sekolah
- 2. **Program**
Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
 - a. Pemberdaya Lanjut Usia
 - b. Pemberdayaan TKSK & TKSM
 - c. Rehabilitas Rumah tidak Layak Huni
 - d. Penanganan, Pencegahan dan penanggulangan Norkoba, Miras dan Zat Adiktif Lainnya
- 3. **Program**
pembinaan Para penyandang cacat dan Trauma
 - a. Pengikatan Kemampuan Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
- 4. **Program**
Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

- a. Dana
Pendamping Peningkatan Kesejahteraan Panti Asuhan

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- a. Konsultasi
Partisipasi Gereja Dalam Pelayanan Hak Azasi Manusi
- b. Pembinaan
Guru Sekolah Minggu dan TK Al-Quran
- c. Pelaksanaan
Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial
- d. Pelatihan
keterampilan Tata Boga, Tata Rias dan Otomotif
- e. Pelatihan
Keterampilan Menjahit

**6. Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**

- a. Pembinaan dan
Pengawasan serta Seleksi Kelompok Usaha Bersama(KUBE)
Penumbuhan dan Pengembangan
- b. Peningkatan
dan Pelatihan PSM, Karang Taruna dan Orsos
- c. Pemberdayaan
TKSK dan TKSM
- d. Peningkatan
Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial

**7. Program
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**

- a. Dana
Pendamping KAT

**B. Pencapaian
Kegiatan**

**1. Program
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya**

- i. meningkatnya SDM bagi Anak Putus Sekolah yang terlaksana 25 orang dari
jumlah yang ditargetkan sebanyak 50 orang

**2. Program
Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial**

- a. Meningkatkan SDM bagi Lansia yang sudah terlati ditahun 2013
sebanyak 20 orang
- b. Peningkatan Kemampuan TKSK & TKSM sebanyak 14 orang
- c. Tersedianya Rumah Layak Huni bagi masyarakat Kurang Mampu
sebanyak 25 unit

- d. Mengurangi Tingkat Pemakai Narkoba, Miras dan Zat Adiktif Lainnya dikalangan Masyarakat di 12 kecamatan

3. Program

pembinaan Para penyandang cacat dan Trauma

- a. Mempermudah Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin, KAT dan PMKS 12 kecamatan

4. Program

Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

- a. Dana Pendamping Peningkatan Kesejahteraan Panti Asuhan sebanyak 7 panti

5. Program

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- a. Meningkatnya Partisipasi Gereja Dalam Pelayanan Hak Azasi Manusia
- b. Tersedianya Guru Sekolah Minggu dan TK All-Alquran yang Handal
- c. Meningkatkan rasa Kesetiakawanan Sosial bagi Masyarakat
- d. Meningkatnya SDM Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan sebanyak 20 orang
- e. Meningkatkan SDM Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan sebanyak 10 orang

6. Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- a. Berkembangnya kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk menumbuhkan kembangkan Usaha sebanyak 19 kelompok
- b. Meningkatnya Sumber Daya Manusia bagi PSM, Karang Taruna dan Orsos
- c. Meningkatnya Kemampuan TKSK dan TKSM dalam Pelaksanaan Pelayanan bagi masyarakat
- d. Meningkatkan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS

7. Program

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

- a. Tersedianya Lahan Matang untuk Pembangunan Perumahan KAT sebanyak 16 unit

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 8
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program di Bidang Sosial

	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah		

	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
	a. latihan keterampilan kepada Anak Putus Sekolah	693.141.000	692.575.000
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	a. emberdaya Lanjut Usia	100.000.000	98.475.000
	b. emberdayaan TKSK & TKSM	150.000.000	149.494.000
	c. ehabilitasi Rumah tidak Layak Huni	1.800.000.000	1.742.699.500
	d. enanganan,Pencegahan dan penanggulangan Norkoba,Miras dan Zat Adiktif Lainnya	686.795.500	677.934.200
3	Program pembinaan Para penyandang cacat dan Trauma		
	1. Pengikatan Kemampuan Pendamping Sosial,Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS	250.000.000	235.667.000
4	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo		
	a. ana Pendamping Peningkatan Kesejahteraan Panti Asuha	244.466.000	238.871.000
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan		

	Sosial		
	a..... onsultasi Partisipasi Gereja Dalam Pelayanan Hak Azasi Manusia	75.000.000	71.602.000
	b..... embinaan Guru Sekolah Minggu dan TK Al-Quran	75.000.000	69.960.000
	c..... elaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial	100.000.000	99.535.000
	d..... elatihan keterampilan Tata Boga,Tata Rias dan Otomotof	221.173.000	212.862.400
	e..... elatihan Keterampilan Menjahit	102.906.000	102.906.000
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
	a..... embinaan dan Pengawasan serta Seleksi Kelompok Usaha Bersama(KUBE) Penumbuhan dan Pengembangan	75.000.000	74.996.000
	b..... eningkatan dan Pelatihan PSM,Karang Taruna dan Orsos	75.000.000	72.240.000
	c..... emberdayaan TKSK dan TKSM	75.000.000	61.775.000

	d. eningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial	150.000.000	137.599.000
7	Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil		
	a. ana Pendamping KAT	900.000.000	853.154.200
	Jumlah	5.773.481.500	5.592.336.300

D. Permasalahan dan Solusi

I. Permasalahan :

a. Kurangnya kelengkapan data PMKS yang akurat

II. Solusi

a. Mengupayakan data yang akurat

b. Melakukan koordinasi ke SKPD yang terkait dan di setiap kecamatan

III..... **Urusan Wajib**

Bidang Tenaga Kerja

A. Program dan Kegiatan

1. **Program**

Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan

a. Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja

2. **Program**

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga TK

a. Pengawasan,Pe
ningkatan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan
dan Keseharan Kerja

3. **Program**

Peningkatan Kualitas

a. Pemberdayaan
Dewan Pengupahan

4. **Program**

Penyelesaian Hubungan Industri

a. Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industri

5. **Program**

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Sosialisasi
Jamsostek Bagi Pedagang Kecil Informal(Pedagang Kaki Lima)

6. **Program**

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Bursa Kerja Online

a. pengembangan

Sarana dan Prasarana Bursa Kerja Online

B. Pencapaian

Kegiatan

1. **Program**

Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan

a. Meningkatkan SDM Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

2. **Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga TK**

a. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum bagi Tenaga Kerja

3. **Program Peningkatan Kualitas**

a. Meningkatkan Pelayanan bagi Tenaga Kerja melalui Dewan Pengupahan

4. **Program Penyelesaian Hubungan Industri**

a. Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri

5. **Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

a. Terlaksananya sosialisasi Jamsostek bagi pedagang kecil informal

6. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Bursa Kerja**

Online

a. Meningkatkan Kemampuan Tenaga Operator Bursa kerja Online

C. Alokasi dan

Realisasi Anggaran

Tabel 9
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program di Bidang Tenaga Kerja

Program / Kegiatan		Anggar an	Realis asi
1	Program Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan		
a.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja	364.96 9.000	361.24 3.000

2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga TK		
	a. engawasan,Peningkatan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keseharan Kerja	100.00 0.000	100.00 0.000
3	Program Peningkatan Kualitas		
	a. emberdayaan Dewan Pengupahan	115.20 0.000	114.74 5.000
4	Program Penyelesaian Hubungan Industri		
	a. enyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	100.00 0.000	99.726. 100
5	Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
	a. osialisasi Jamsostek Bagi Pedagang Kecil Informal(Pedagang Kaki Lima)	100.00 0.000	99.231. 000
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Bursa Kerja Online		
	a. engembangan Sarana dan Prasarana Bursa Kerja Online	100.00 0.000	92.592. 0000
	Jumlah	880.16 9.000	867.53 7.100

E. Permasalahan dan Solusi

I. Permasalahan :

- a. Kurangnya data tenaga kerja yang akurat antara pegawai tetap dan kontrak di perusahaan serta data – data penunjang perusahaan tentang ketenaga kerjaan

IV..... Solusi:

- a..... Perusahaan melaksanakan pendataan

IV.Urusan Wajib Bidang Transmigrasi

A..... Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- a. Survey Kawasan dan Pendapatan Tranmigrasi Lokal Kab. Malinau

- b. Perencanaan Transmigrasi Lokal di Long Tebuan Kec. Sungai Boh

B. Pencapaian

Kegiatan

1. **Program**

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

b. Meningkatnya Pelayanan bagi masyarakat terencil melalui Survey Kawasan dan Pendapatan Transmigrasi Lokal Kab. Malinau

c. Meningkatnya Pelayanan bagi masyarakat terencil melalui Survey Kawasan dan Pendapatan Tranmigrasi Lokal Kab. Malinau

C. **Alokasi dan**

Realisasi Anggaran

Tabel 10
Alokasi dan Realisasi Anggaran di Bidang Transmigrasi

	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		
	a. urvey Kawasan dan Pendapatan Tranmigrasi Lokal Kab. Malinau	100.00 0.000	92.592 .000
	b. erencanaan Transmigrasi Lokal di Long Tebuan Kec. Sungai Boh	150.00 0.000	0

D. Permasalahan dan Solusi

I. Permasalahan

Masih banyak desa – desa yang terpecah untuk di jadikan Transmigrasi Lokal

II. Solusi

Pemerintah khususnya di Bidang transmigrasi mengadakan pendataan

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penetapan kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2013 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2013.

Sasaran strategis akan dicapai dengan pelaksanaan 14 (satu) program yaitu Program Penunjang Administrasi Pemerintah, 6 Program dibidang Sosial, 6 Program di Bidang Tenaga kerja dan 1 Program di bidang yang dijabarkan ke dalam 26 (dua puluh enam) kegiatan pada tahun 2013. Rincian program dan kegiatan beserta indikator dan target kinerja dapat dilihat dalam lampiran 2 Penetapan Kinerja Tahun 2013.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. LAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistemik sebagai alat/ tolok ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan ini memberikan gambaran tentang penilaian tingkat pencapaian kinerja atas indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Pengukuran capaian kinerja tahun 2013 yang disajikan merujuk pada tanggung jawab organisasi dan merupakan hasil realisasi atas seluruh kegiatan dalam tahun 2013 serta

pengukurannya ditujukan untuk evaluasi target rencana kinerja yang berorientasi pada hasil yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi serta menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau. Proses penilaian ini dimaksudkan untuk melihat pencapaian setiap indikator kinerja yang dilaksanakan secara sistematis guna memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau di tahun 2013, maka diperoleh capaian kinerja. Adapun sasaran strategis, indikator dan target kinerja, beserta realisasi target dan persentase capaian dapat dilihat dalam lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2013.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar data dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2011 – 2016 sebanyak 9 (Sembilan) sasaran. sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2013 adalah sebanyak 7 (tujuh) yaitu :

1. Tersedianya SDM yang mempunyai Skill komputerisasi dan manajemen pelayanan yang handal.
2. Tersedianya SDM yang berkualitas dan kreatif untuk mengembangkan pelayanan yang optimal dan bermutu.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang baik kualitas maupun kuantitas untuk mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
4. Tersedianya TKSM/TKSK, lembaga ketenagakerjaan, organisasi pekerja dan pengusaha lainnya yang mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemabangunan masyarakat di kabupaten Malinau.
5. Tersedianya Tenaga Kerja yang handal dan berdaya saing tinggi.
6. Tersedianya peraturan Perundang-undangan yang jelas tentang semua aspek bidang Ketenagakerjaan baik dari Pusat maupun Daerah.
7. Tersedianya Daerah Transmigrasi khususnya Transmigrasi Lokal untuk pemerataan laju pembangunan.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja.

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Tersedianya SDM yang mempunyai Skill komputerisasi dan manajemen pelayanan yang handal.

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran tersedianya SDM yang mempunyai Skill komputerisasi dan manajemen pelayanan yang handal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 11
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah SDM yang menguasai IPTEK	5 orang	5 orang	100

- Jumlah SDM yang menguasai IPTEK

Indikator untuk sasaran ini adalah jumlah tenaga yang sudah terlatih pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau. Untuk tahun 2013 ditargetkan pelaksanaan pelatihan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau dapat terlaksana 5 orang, hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tercapai 100%.

Sasaran 2 : Tersedianya SDM yang berkualitas dan kreatif untuk mengembangkan pelayanan yang optimal dan bermutu

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 12
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah tenaga yang siap melayani secara optimal dan berkualitas	4 orang	4 orang	100

- Jumlah tenaga yang siap melayani secara optimal dan berkualitas Indikator kinerja sasaran ini adalah jumlah tenaga yang siap melayani. Untuk tahun 2013, ditargetkan jumlah 4 orang. Dari segi jumlah tenaga tersebut, target kinerja dapat terpenuhi.

Sasaran 3 : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang baik kualitas maupun kuantitas untuk mengurangi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatnya jumlah PMKS yang mendapatkan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 13
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah PMKS yang mendapatkan sarana dan prasarana	7 panti asuhan	7 panti asuhan	100 %

Indikator untuk sasaran ini adalah Jumlah PMKS yang mendapatkan sarana dan prasarana Pada tahun 2013, ditargetkan sebanyak 7 Panti asuhan. Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pendamping Peningkatan Kesejahteraan Panti Asuhan hingga akhir tahun 2013 tercapai 7 Panti Asuhan 100%

Sasaran 4 : Tersedianya TKSM/TKSK, lembaga ketenagakerjaan, organisasi pekerja dan pengusaha lainnya yang mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan masyarakat di Kabupaten Malinau

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatnya **Pemberdayaan TKSM/TKSK disetiap Kecamatan** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.14
Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Pemberdayaan TKSM/TKSK disetiap Kecamatan	14 orang	14 orang	100 %

- Jumlah **Pemberdayaan TKSM/TKSK disetiap Kecamatan** Indikator untuk sasaran ini adalah jumlah TKSM/TKSK yang ada disetiap Kecamatan Pada tahun 2013, ditargetkan 14 orang. Hasil dari target yang telah ditetapkan maka hasil dari kegiatan TKSK/TKSM tercapai 100 %

Sasaran 5 : Tersedianya Tenaga Kerja yang handal dan berdaya saing tinggi

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatnya **Tenaga Kerja yang handal dan berdaya saing tinggi**

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 15
Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Tenaga Kerja yang siap bekerja / yang sdh bekerja	2376 orang	538 orang	40 %

Indikator untuk sasaran ini adalah Jumlah Tenaga Kerja yang siap bekerja / yang sdh bekerja di Kabupaten Malinau adalah 538 sedang jumlah pencari kerja 2376 orang yang ada di kabupaten Malinau Pada tahun 2013. Dari target yang telah mendaftar mencari kerja hanya 40 % yang tercapai

Sasaran6 : Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang _ undangan yang jelas tentang semua aspek bidang Ketenagakerjaan baik dari pusat maupun Daerah

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatnya Sosialisasi **Peraturan Perundang _ undangan yang jelas tentang semua aspek bidang Ketenagakerjaan baik dari pusat maupun Daerah** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 16
Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang _ undangan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	12 perusahaan	12 perusahaan	100 %

- Indikator untuk sasaran ini adalah Jumlah Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan adalah 12 perusahaan. Dari segi jumlah tenaga tersebut, target kinerja dapat terpenuhi 100 %.

Sasaran 7 : Tersedianya Daerah Transmigrasi khususnya Transmigrasi Lokal untuk pemerataan laju pembangunan

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran meningkatnya **Daerah Transmigrasi khususnya Transmigrasi Lokal untuk pemerataan laju pembangunan** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 17
Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kawasan transmigrasi yang mampu menyerap dan menumbuhkembangkan ekonomi secara merata	4 kecamatan	1 kecamatan	25 %

- Indikator untuk sasaran ini adalah Jumlah kawasan transmigrasi yang mampu menyerap dan menumbuhkembangkan ekonomi secara merata di Kabupaten Malinau adalah 4 kecamatan yang ditargetkan. Hasil dari target yang telah ditetapkan dari kegiatan Survey Kawasan dan Pendapatan Tranmigrasi Lokal Kab. Malinau tercapai 25 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Belanja Tidak Langsung tahun 2013 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp. 2.222.168.750,- Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 2.087.269.00,- atau 93,92% Sedangkan Anggaran Belanja Langsung Pembangunan (Kegiatan) sebesar Rp. 7.303.650.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 6.957.836.300,- atau sebesar 98,59%. Realisasi keuangan tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 18
Realisasi Belanja Tidak Langsung

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase(%)
1. Gaji Pokok	1.334.625.000	1.282.073.500	96.06

	PNS/Uang			
2.	Tunjangan Keluarga	130.000.000	128.000.926	98.46
3.	Tunjangan Jabatan	179.950.000	177.505.000	98.64
4.	Tunjangan Fungsional Umum	105.475000	90.939.980	43.19.
5.	Tunjangan Beras	91.825.000	30.031.257	99.03
6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.642.500		84.25
7.	Pembulatan Gaji	51.250	23.344	45.54
8.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	231.600.000	231.600.000	100.00
9.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	113.000.000	101.540.000	89.85
	Jumlah	2.22.168.750	2.041.714.007	93.92

Tabel. 19
Realisasi Belanja Langsung

No	Uraian (Nama Program)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penunjang Administrasi Perkantoran	400.000.000	399.588.000	99.90

	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan	693.141.000	692.575.000	99.92
	Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial Pemberdaya Lanjut Usia	100.000.000	98.475.000	98.82
	Pemberdayaan TKSK & TKSM	150.000.000	149.494.000	99.66
	Rehabilitas Rumah tidak Layak Huni	1.800.000.000	1742.699.500	96.82
	Penanganan,Pencegahan dan penanggulangan Norkoba,Miras dan Zat Adiktif Lainnya	686.795.500	677.934.200	98.71
	Program pembinaan Para penyandang cacat dan Trauma Pengikatan Kemampuan Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS	250.000.000	235.667.000	94.27
	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Dana Pendamping Peningkatan Kesejahteraan Panti Asuhan	244.466.000	238.871.000	97.71

	Konsultasi Partisipasi Gereja Dalam Pelayanan Hak Azasi Manusi	75.000.000	71.602.000	95.47
	Pembinaan Guru Sekolah Minggu dan TK Al-Quran	75.000.000	69.960.000	93.28
	Pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial	100.000.000	99.535.000	99.54
	Pelatihan keterampilan Tata Boga,Tata Rias dan Otomotif	221.173.000	212.862.400	96.24
	Program Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan			
	Pelatihan Keterampilan Menjahit	102.906.000	102.906.000	100.00
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja	364.969.000	361.243.000	98.98
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga TK Pengawasan,Peningkatan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	100.000.000	100.000.000	100.00
	Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Dewan Pengupahan	115.200.000	114.745.000	99.61
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang			

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
	Pembinaan dan Pengawasan serta Seleksi Kelompok Usaha Bersama(KUBE) Penumbuhan dan Pengembangan	75.000.000	74.996.000	99.99
	Peningkatan dan Pelatihan PSM,Karang Taruna dan Orsos	75.000.000	72.240.000	96.32
	Pemberdayaan TKSK dan TKSM			
	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial	75.000.000	61.775.000	82.37
		150.000.000	137.599.000	91.73
	Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dana Pendamping KAT	900.000.000	853.145.200	94.79
	Program Penyelesaian Hubungan Industri Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	100.000.000	99.726.100	99.7
	Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sosialisasi Jamsostek Bagi Pedagang Kecil Informal (Pedagang Kaki Lima)	100.000.000	99.726.100	99.23
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			
	Survey Kawasan dan Pendapatan Tranmigrasi Lokal Kab. Malinau	100.000.000	98.365.500	98.37
	Perencanaan	150.000.000	0	0

	Transmigrasi Lokal di Long Tebuan Kec. Sungai Boh			
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Bursa Kerja Online pengembangan Sarana dan Prasarana Bursa Kerja Online	100.000.000	92.592.000	92.59

BAB IV P E N U T U P

Secara umum penyelenggaraan program pembangunan bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi di Lingkungan Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau tahun anggaran 2012, masih melaksanakan program pembangunan dan Kegiatan Dissosnakertrans tahun 2011.

Dalam proses perencanaan, pelaksanaan kebijaksanaan strategis sampai dengan evaluasi yang meliputi pengukuran kerja ternyata Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Malinau khususnya anggaran tahun pembangunan memperoleh nilai pengukuran kerja sebesar 8 % sehingga dapat disimpul kan bahwa Dinas sosial tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau dengan segala keterbatasannya mampu melaksanakan kerjanya dengan cukup baik.

Ada pun strategi pemecahan yang ditahun mendatang secara umum antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pembelian pelayanan dalam masyarakat dalam pelenggaraan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten malinau agar pelayanan yang lebih baik terwujud.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Bimbingan teknis dan pelatihan ketrampilan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan calon tenaga kerja serta penyanggunaan agar mereka mampu mandiri serta memperoleh pelatihan ketrampilan.
- c. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan histansi lintas sektoral terkait dalam penyusunan rencana teknis rencana teknis satuan pemukiman Transmigrasi (RTSP) tertanam dalam status bahan agar sesuai dengan peruntukannya dan mengetahui terjadinya tumpang tindih pemanfaatan lahan dengan pembentukan lain nya.
- d. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor terkait dalam hal pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini di
buat, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 30 Januari 2013

KEPALA DISSOSNAKERTRANS,

Drs. Yusuf Rapa, M.Si

Nip. 19581213 198501 1 009